



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori yang mendasari topik penelitian kali ini yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRSD), tata kelola (*Good Corporate Governance*), kinerja keuangan (ROA) dan ukuran perusahaan (*size*). Penulis juga melampirkan penelitian terdahulu untuk memperkuat penelitian yang akan disusun. Dalam bab ini juga memuat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan pola berpikir penulis yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran penelitian ini memuat pemetaan kerangka teoritis yang diperoleh dari berbagai konsep teori atau penelitian terdahulu. Bagian terakhir adalah hipotesis, yang mana merupakan dugaan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian. Hipotesis sendiri akan merujuk pada kerangka pemikiran.

A. Landasan Teoritis

Teori Agensi

Prinsip dasar teori ini merupakan hadirnya ikatan kerja antara pihak yang menyediakan wewenang (agensi) yaitu manajer dengan pemilik perusahaan (prinsipal). Jensen & Meckling (1976) mengatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu perjanjian di mana ada satu atau lebih orang (*principal*) yang dengan sengaja melibatkan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan sejumlah layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Pendapatnya didukung oleh Ross (1973) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul di antara dua (atau lebih) pihak di mana salah satu pihak ditunjuk sebagai agen yang bertindak sebagai perwakilan untuk pihak lain (*principal*) dalam mengelola kegiatan perusahaan serta proses pengambilan keputusan.



Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Eisenhardt (1989) mengemukakan bahwa teori keagenan merupakan teori yang berfokus pada penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh segala pihak yang terlibat dengan hubungan keagenan. Ada dua masalah yang dibahas, pertama masalah yang disebabkan oleh perbedaan tujuan yang ingin diwujudkan prinsipal dan agen, serta prinsipal yang mengalami kesulitan dalam memastikan perilaku agen termasuk dari segi biaya pengawasan. Masalah kedua disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dan tindakan yang dimiliki prinsipal dan agen dalam menanggulangi risiko. Eisenhardt (1989) juga menunjukkan tiga asumsi terkait teori keagenan, yaitu:

- a. *People* atau manusia yang mana mempunyai sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia juga mempunyai daya pikir yang terbatas menyangkut persepsi masa depan (*bounded rationality*), dan manusia selalu enggan mengambil risiko (*risk averse*).
- b. *Organization* atau organisasi yang merupakan wadah ketidakselarasan tujuan yang dapat terjadi diantara anggotanya serta efisiensi sebagai kriteria efektifitas dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.
- c. *Information* atau informasi yang merupakan asumsi suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Seperti apa yang telah dijelaskan diatas, sudah sewajarnya manusia sebagai individu memiliki motivasi atas kepentingan dirinya sendiri yang mana dapat menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal (pemilik) memiliki motivasi untuk mengadakan kontrak guna kesejahteraan dirinya serta meningkatkan profitabilitas (Widyaningdyah, 2001). Lain halnya dengan pihak agen (manajer) yang memiliki motivasi untuk memaksimalkan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemenuhan ekonomi dan psikologisnya dalam memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Karena perbedaan penyebab motivasi keduanya adalah yang mengakibatkan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dalam mewujudkan atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.

Permasalahan yang timbul karena perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dikenal sebagai *agency problems*. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan *agency problems* adalah *asymmetric information* yang mana merupakan ketidaksetaraan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Hal tersebut terjadi ketika prinsipal tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja agen, dan sebaliknya agen memiliki informasi yang lebih banyak tentang kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan (Widyaningdyah, 2001).

Terdapat dua pandangan mengenai asimetri permasalahan menurut Jensen & Meckling (1976) dan Scott (2015) yang akan diuraikan di bawah ini:

a. *Moral hazard*

Menurut Jensen & Meckling (1976), asimetri ini merupakan permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam kontak kerja. Sedangkan menurut Scott (2015) asimetri ini terjadi saat agen melakukan kegiatan tanpa sepengetahuan prinsipal di mana kegiatan tersebut secara etika atau norma kurang layak untuk dilakukan.

b. *Adverse selection*

Menurut Jensen & Meckling (1976) asimetri ini merupakan suatu situasi di mana prinsipal tidak mampu mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diperolehnya atau atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Sedangkan Scott (2015) mengatakan asimetri ini terjadi saat agen lebih banyak mengetahui informasi terkait fakta dibanding pihak luar yang mana dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Selain permasalahan yang ditimbulkan dari asimetri informasi, konflik antara prinsipal dan agen juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dalam upaya mengatasi konflik tersebut terdapat biaya keagenan (*agency cost*) yang terdiri dari *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss* (Jensen & Meckling, 1976). *Monitoring cost* atau biaya pengawasan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membatasi perilaku menyimpang oleh agen. *Bonding cost* atau biaya perjanjian merupakan biaya untuk memastikan bahwa agen tidak akan mengambil tindakan yang dapat membahayakan prinsipal atau jika sampai tindakan yang membahayakan itu terjadi agen harus memastikan adanya kompensasi terhadap prinsipal. *Residual loss* atau visibilitas politis merupakan biaya terkait berkurangnya kesejahteraan prinsipal akibat konflik dalam hubungan agensi.

Dalam hubungan agensi, ketiga biaya tersebut sangat berdampak terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut terjadi karena sejumlah perusahaan melaksanakan pengungkapan CSR dengan tujuan membangun *image* perusahaan serta untuk memperoleh perhatian publik. Dalam menyediakan informasi pertanggungjawaban sosial, perusahaan memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga perusahaan memutuskan untuk melaporkan laba pada laporan tahunan menjadi lebih rendah. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan harus dihadapkan dengan biaya perjanjian dan biaya pengawasan yang cenderung rendah namun dengan visibilitas politis yang tinggi sehingga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial. Jadi dapat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disimpulkan bahwa CSR memiliki hubungan yang positif dengan kinerja sosial maupun ekonomi serta visibilitas politis, namun memiliki hubungan yang negatif dengan biaya perjanjian dan pengawasan (Belkaoui & Karpik, 1989).

Perkembangan dalam teori agensi ini mendapat respon yang lebih luas karena dipandang dapat lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Teori agensi menjadi tumpuan atas berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* yang semakin berkembang di mana perusahaan yang beroperasi perlu diawasi serta dikontrol guna memastikan bahwa pengoperasian dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang masih berlaku.

Beberapa peneliti seperti Lestari (2020); Simarmata (2018) dan Hardiningsih (2010) menggunakan teori agensi dalam mengungkapkan pengaruh *corporate governance* dan menemukan bahwa tata kelola yang baik dapat membuat investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan terhadap mereka, karena manajer tidak akan menggelapkan dana investasi mereka sebab *corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Simarmata, 2018). Sehingga dapat dikatakan bahwa *corporate governance* dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*). Di samping itu, peneliti terdahulu yang memilih teori agensi menjadi dasar penelitiannya dalam mengungkapkan pengaruh *corporate social responsibility disclosure* adalah Sembiring (2013), Shafariani (2013) serta Aini (2015). Praktik CSR dan pengungkapannya dikaitkan dengan teori agensi karena dianggap sebagai komitmen agen dalam meningkatkan kinerjanya terutama dalam kinerja sosial yang mana dapat berdampak positif terhadap penilaian *stakeholders*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat (Gray et al., 1995). Beberapa peneliti seperti Preston dan Post (1975), Hogner (1982), Lehman (1983), dan Lindblom (1983) dalam Guthrie & Parker (1989) menyatakan teori legitimasi dapat menunjukkan bahwa pengungkapan perusahaan berpengaruh terhadap faktor lingkungan (ekonomi, sosial dan politik) dan pengungkapan tersebut melegitimasi tindakan.

Menurut Guthrie & Parker (1989), teori tersebut mengatakan bahwa perusahaan beroperasi di tengah masyarakat melalui kontrak sosial di mana perusahaan setuju untuk melakukan berbagai tindakan yang diingkan secara sosial dengan imbalan persetujuan, penghargaan dan keberlangsungan perusahaan. Perusahaan dalam melaksanakan kontrak sosial lingkungan perlu memperhatikan norma yang berlaku di tengah masyarakat agar sejalan dengan nilai sosial yang ada. Hogner (1982) dalam Wilmshurst & Frost (2000) juga menyarankan bahwa pengungkapan CSR suatu perusahaan didukung oleh kebutuhannya dalam melegitimasi kegiatan.

Wilmshurst & Frost (2000) mengemukakan bahwa teori legitimasi didasari oleh tumbuhnya kesadaran serta perhatian masyarakat bahwa perusahaan akan mengambil tindakan untuk memastikan aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga perusahaan menyadari pentingnya kontrak sosial dengan masyarakat demi keberlangsungan suatu perusahaan dan CSR sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Hal tersebut selaras dengan *legitimacy theory* yang diungkapkan oleh Tilt (1994) bahwa perusahaan mempunyai kontrak dengan masyarakat untuk melaksanakan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kegiatannya berdasarkan nilai keadilan serta bagaimana perusahaan menanggapi berbagai tuntutan kelompok kepentingan yang berbeda dalam melegitimasi tindakan perusahaan.

Teori legitimasi juga mengungkapkan bahwa perusahaan yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh norma dan nilai sosial serta reaksi terhadap batasan tersebut meningkatkan pentingnya suatu perilaku organisasi dalam memperhatikan lingkungannya (Dowling & Pfeffer, 1975). Dalam penelitiannya Dowling & Pfeffer (1975) juga menjelaskan terdapat dua dimensi untuk perusahaan agar memperoleh dukungan legitimasi, yaitu:

- a. Aktivitas organisasi perusahaan dituntut untuk sesuai (*congruance*) dengan sistem nilai di tengah masyarakat
- b. Pelaporan atas aktivitas perusahaan harus mencerminkan nilai sosial

Perusahaan perlu mengungkapkannya aktivitas sosialnya agar dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menjamin kelanjutan hidup perusahaannya. Pengungkapan ini juga berfungsi untuk melegitimasi aktivitas perusahaan di tengah pandangan masyarakat, karena pengungkapan aktivitas sosial dapat menghasilkan tingkat kepatuhan perusahaan (Reverte, 2009). Sehingga, perusahaan mulai memahami betapa pentingnya hubungan masyarakat dengan lingkungan sekitar perusahaan terhadap kesinambungan hidup perusahaannya,

Tujuan pokok perusahaan melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat mengenai aktivitas sosial yang dijalankan oleh perusahaan dan dampaknya terhadap masyarakat itu sendiri. Namun, tanggungjawab sosial tidak hanya berlaku untuk masyarakat

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tetapi juga ditunjukkan untuk para pemegang sahamnya (*stakeholder*). *Stakeholder* memandang tanggung jawab sosial perusahaan sebagai aktivitas yang disertai integritas dalam pelaksanaan etika berbisnis (*business ethics integrity*) dan mampu meningkatkan perilaku tanggungjawab sosial perusahaan (*social responsibility*). Dengan melakukan peningkatan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial, hal tersebut dapat menghasilkan dampak positif berupa reputasi perusahaan, memelihara *image* serta strategi perusahaan (Wibisono, 2007).

Beberapa studi terdahulu yang membahas mengenai pengungkapan sosial dan lingkungan telah memilih teori legitimasi sebagai dasar atas aplikasi pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Reverte (2009); Ajilaksana & Kiswara (2011); serta Saripudin (2011).

Teori *Stakeholder*

Menurut penelitian Donaldson & Preston (1995), teori *stakeholder* merupakan teori yang ditujukan untuk membahas dan merujuk kepada struktur maupun prosedur yang perlu diterapkan dalam mempertahankan keberlangsungan suatu perusahaan. *Stakeholder* sendiri memiliki artian sebagai sebuah karyawan, kreditor, pelanggan, *supplier*, ataupun komunitas yang bersangkutan dengan kegiatan perusahaan (Freeman, 1994). *Stakeholder theory* dikenal sebagai teori yang mengutarakan bahwa perusahaan bukan sekedar entitas yang beroperasi demi kemakmurannya sendiri, namun dituntut untuk menyediakan manfaat bagi para *stakeholders*-nya.

Clarkson (1995) juga menambahkan pendapat mengenai *stakeholder* yang dikenal sebagai pihak atau kelompok yang mempunyai kepemilikan, hak, hingga

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepentingan dalam menjalankan suatu kegiatan di dalam perusahaan, baik di masa lampau maupun di masa sekarang atau bahkan di masa depan. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan sangat bergantung pada *stakeholder*. Pendapat tersebut didukung oleh Freeman & Phillips (2002) yang mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu perusahaan bergantung pada seberapa baik hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan *stakeholder* yang mana dapat membantu perusahaan dalam mewujudkan tujuannya.

Pada umumnya, teori *stakeholder* menjelaskan tentang hubungan yang dinamis dan kompleks antara organisasi dan lingkungannya (Gray, Owen, & Adams, 1996). Dalam penelitiannya Steadman & Green (1997) juga menjelaskan *stakeholder* merupakan kelompok yang memiliki keterkaitan antara perusahaan dengan target untuk mencapai kebutuhan pribadi masing-masing pemangku kepentingan atau juga bisa diartikan pihak yang kehadirannya penting oleh perusahaan itu sendiri. Tugas utama dari perusahaan adalah memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan berbagai tuntutan yang saling bertentangan antar pemangku kepentingan perusahaan (Roberts, 1992). Dalam menyeimbangkan tuntutan tersebut suatu perusahaan perlu mempunyai tata kelola yang baik guna melaksanakan pengawasan agar menciptakan transparansi kinerja manajemen sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Bagi suatu korporasi, keberlangsungan eksistensinya membutuhkan dukungan dari *stakeholders*. Freeman dan Friedman juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai definisi *stakeholders* (Chariri & Ghozali, 2007).

Friedman (1962) mengemukakan bahwa memaksimalkan kemakmuran pemiliknya merupakan tujuan utama pendirian perusahaan, lain halnya dengan Freeman & Reed (1983) yang mengembangkan makna *stakeholders* dengan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memuat elemen yang lebih luas, seperti kaum yang kurang menguntungkan (*adversial group*) contohnya pihak yang hanya memiliki kepentingan khusus atau regulator. Freeman & Reed (1983) juga menggolongkan *stakeholders* menjadi dua jenis yaitu *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder. *Stakeholders* primer berarti *stakeholders* yang mampu mempengaruhi serta dipengaruhi oleh strategi dari perusahaan secara langsung. Golongan ini memuat *shareholder*, investor, pemilik, pekerja hingga pelanggan. Sedangkan *stakeholders* sekunder artinya *stakeholders* yang mampu mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh strategi perusahaan secara tidak langsung seperti pemerintah, masyarakat umum, maupun lingkup tempat perusahaan beroperasi.

Pengungkapan CSR dalam laporan keberlanjutan perusahaan merupakan salah satu bentuk realisasi strategi korporat. Pengungkapan ini perlu dipraktikkan perusahaan demi kelangsungan investor selaku bagian dari *stakeholder* dalam menilai sudah sejauh mana perusahaan memenuhi tugasnya sesuai dengan keinginan *stakeholder*. Daud & Amri (2008) beropini bahwa golongan tersebut menjadi salah satu instrumen pertimbangan paling utama bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas informasinya.

Perusahaan yang sudah mempraktikkan CSR dengan baik biasanya mempengaruhi kinerja perusahaan ke arah yang positif karena selain dalam hal pengambilan keputusan, pengungkapan CSR pun seharusnya lebih dari sekedar tindakan memaksimalkan laba untuk pemegang saham. Kinerja perusahaan dapat meningkat dikarenakan para *stakeholder* memandang perusahaan yang telah mempraktikkan CSR merupakan perusahaan yang peduli atas persoalan lingkungan dan sosial yang terjadi, yang mana nantinya para *stakeholder* akan menyalurkan dukungan penuh atas segala keputusan yang nanti akan diambil demi perusahaan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



selama tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, jika perusahaan kurang memperhatikan *stakeholder*, maka mereka harus siap menerima protes atas kelalaiannya tersebut.

Hasil dari penelitian Roberts (1992) yang menggunakan teori *stakeholder* menemukan bahwa *stakeholder power*, *strategic posture*, dan kinerja ekonomi memiliki pengaruh terhadap *corporate social disclosure*. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkah laku investor sebagai salah satu pengguna laporan keuangan mampu mempengaruhi *corporate social disclosure* dan sebaliknya, investor membutuhkan *corporate social disclosure* sebagai alat pertimbangan untuk melakukan investasi selain dengan mengacu pada laba. Beberapa peneliti seperti Shafariani (2013), Pamungkas & Winarsih (2020) dan Aprianto (2016) menggunakan teori *stakeholder* sebagai dasar penelitiannya dalam mengungkapkan pengaruh *corporate social responsibility disclosure*.

Teori Sinyal

Menurut Spence (1973), teori ini melibatkan dua pihak yaitu pihak internal selaku manajemen yang memberikan sinyal dan pihak eksternal seperti investor yang menerima sinyal tersebut. *Signaling theory* membangun teori berdasarkan pada adanya informasi asimetris (*asymmetric information*) antar keunggulan informasi manajerial (*well informed manager*) dengan pemegang saham (*stockholder*) (Karimah, 2015). Di mana manajer akan mengumumkan kepada investor ketika mendapatkan informasi baik, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, tetapi investor tidak akan langsung mempercayainya sehingga perusahaan perlu melakukan *signal* tersebut.

Sagala & Muslih (2020) menjelaskan *signaling theory* merupakan alasan perusahaan perlu mempublikasi informasi seperti laporan keuangan pada pihak



eksternal. Adanya ketidakseimbangan informasi yang terjadi antara manajer (pihak internal) dan kreditur maupun investor (pihak eksternal) telah mengurangi kredibilitas perusahaan, sehingga nilai perusahaan menjadi rendah. Sebagai upaya dalam menanggulangi asimetri informasi tersebut manajer hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting berkaitan dengan perusahaan untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar.

Menurut Jogiyanto (2003) dalam Simarmata (2018) informasi yang dipublikasi sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Saat informasi diumumkan dan diterima pelaku pasar, pelaku pasar akan menginterpretasikan dan menganalisis terlebih dahulu informasi tersebut sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*). Pengumuman informasi akuntansi yang baik (*good news*) memberikan arti bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik di masa mendatang, sehingga investor tertarik dan pasar akan bereaksi dengan menunjukkan perubahan dalam volume perdagangan saham. Hal tersebut membuat hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. Pelaksanaan analisis terhadap laporan keuangan diharapkan menjadi acuan bagi investor dalam mengambil keputusan terkait dengan investasinya atau dapat dikatakan informasi tersebut dapat menyebabkan harga saham berfluktuasi. Sedangkan *bad news* dapat berupa pembatalan rencana investasi atau memberikan harga rendah terhadap saham perusahaan.

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat dijadikan sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang bersangkutan dengan laporan keuangan maupun non-keuangan. Semua investor memerlukan informasi untuk mengevaluasi risiko relatif setiap perusahaan sehingga dapat melakukan diversifikasi portofolio dan kombinasi investasi dengan preferensi risiko yang diinginkan. Jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibeli oleh investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan transparan (Putra & Chabachib, 2013).

Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Dalam PSAK No.1 Paragraf 9 (2018: 1.3) laporan keuangan didefinisikan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Definisi lain dari laporan keuangan juga dikemukakan oleh Kieso et al. (2018:1-4) yang mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang menjadi sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangannya pada pihak di luar perusahaan, yang biasanya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Para pemangku kepentingan seperti investor dan kreditor dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk membantunya dalam pengambilan keputusan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No.1 Paragraf 9 (2018: 1.3) adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar



pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Sementara itu menurut Kieso et al. (2018:1-6) laporan keuangan memiliki tujuan umum untuk menyediakan informasi bagi banyak penggunanya, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, karyawan, dan pemerintah sehingga pihak-pihak tersebut dapat memahami kinerja keuangan serta kinerja lain dari entitas.

c. **Komponen Laporan Keuangan**

Menurut PSAK No.1 Paragraf 10 (2018: 1.3) komponen laporan keuangan terdiri dari:

- (1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
- (2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
- (3) Laporan perubahan ekuitas selama periode.
- (4) Laporan arus kas selama periode.
- (5) Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
- (6) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A.
- (7) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai paragraf 40A-40D.

d. **Karakteristik Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif dari laporan keuangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi informasi mana yang lebih berguna dan kurang berguna dalam pengambilan keputusan (Kieso et al., 2018:2-6). Melalui identifikasi



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tersebut pengungkapan informasi pada pelaporan keuangan dapat menjadi lebih bermutu dan bermanfaat bagi para pengguna laporan. Karakteristik kualitatif sendiri terdiri atas kualitas dasar (*fundamental qualities*) dan kualitas penunjang (*enhancing qualities*). Berikut ini adalah karakteristik dari kualitas dasar:

(1) Relevansi

Relevansi merupakan salah satu bentuk kualitas fundamental yang menjadikan informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi mampu dikatakan relevan apabila memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Berikut ini adalah tiga syarat informasi dapat dikatakan relevan:

- (a) Memiliki nilai prediktif (*predictive value*), artinya informasi keuangan sebagai input dalam proses prediksi memiliki nilai (*value*) yang digunakan oleh investor untuk membangun ekspektasi mereka mengenai masa depan.
- (b) Memiliki nilai yang terkonfirmasi (*confirmatory value*), artinya informasi yang relevan dapat membantu penggunaannya untuk mengkonfirmasi atau memperbaiki dugaan awalnya.
- (c) Memiliki materialitas (*materiality*), artinya informasi bersifat material (penting), di mana ketika informasi tidak disajikan atau salah saji maka hal tersebut dapat mempengaruhi pengguna dalam membuat keputusan.

(2) *Faithful Representation*

Faithful representation merupakan serangkaian angka-angka dan deskripsi yang terdapat dalam laporan keuangan di mana hal tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

benar-benar ada atau terjadi. Informasi dapat dikatakan *faithfully represent* (dinyatakan secara benar) apabila:

- (a) Lengkap (kelengkapan/*completeness*), artinya semua informasi yang diperlukan telah tersedia.
- (b) Netral (*neutrality*), artinya perusahaan tidak menyediakan informasi yang hanya berpihak pada kepentingan satu pengguna.
- (c) Bebas dari kesalahan (*free from error*), informasi yang bebas dari kesalahan akan menjadi lebih akurat.

Selanjutnya akan dijabarkan karakteristik dari kualitas penunjang yang menjadi pelengkap kualitas dasar dan dapat membedakan kebergunaan informasi sebagai berikut:

- (1) Dapat dibandingkan (*comparability*), artinya informasi yang diukur dan dilaporkan melalui cara yang serupa untuk perusahaan yang berbeda diharapkan dapat diperbandingkan satu sama lain. Karakteristik ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan peristiwa ekonomi antar perusahaan.
- (2) Dapat diverifikasikan (*verifiability*), artinya ketika informasi yang tersedia diukur dengan metode yang sama akan menghasilkan hasil yang kurang lebih sama.
- (3) Ketepatan waktu (*timeliness*), artinya informasi tersedia bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pembuatan keputusan.
- (4) Dapat dipahami (*understandability*), artinya informasi dapat dengan mudah dipahami oleh penggunanya secara umum. Kualitas ini akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkat ketika informasi terklasifikasi, tergolongkan, dan tersajikan secara jelas dan ringkas.

e. Pengguna Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK - Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan PSAK (2014: 3) menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Setiap pengguna memiliki kebutuhan informasi yang berbeda, yang akan dijabarkan di bawah ini:

(1) Investor

Investor dan penasihat investor memerlukan informasi yang berkenaan dengan risiko yang melekat, perkembangan hasil atas investasi yang telah ditanamkan, serta kemampuan entitas membayar dividen. Informasi tersebut dibutuhkan untuk membuat keputusan berkaitan dengan membeli, menahan, dan menjual investasi yang dimiliki.

(2) Karyawan

Karyawan dan kelompok perwakilan karyawan membutuhkan informasi mengenai stabilitas perusahaan, profitabilitas perusahaan, penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberi insentif, imbalan pasca kerja, dan kesempatan kerja.

(3) Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman mempunyai kepentingan atas informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman serta bunga pada saat jatuh tempo.

(4) Pemasok dan kreditor usaha lainnya

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pemasok dan kreditur usaha lainnya mempunyai kepentingan atas informasi kemampuan perusahaan untuk membayar jumlah terhutang pada saat jatuh tempo.

(5) Pelanggan

Pelanggan mempunyai kepentingan atas informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama pelanggan yang terlibat dalam perjanjian jangka panjang dan pelanggan yang mempunyai ketergantungan pada perusahaan.

(6) Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga memiliki kepentingan berkenaan dengan alokasi sumber daya sehingga memerlukan informasi atas aktivitas entitas. Pemerintah membutuhkan informasi tersebut untuk mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

(7) Masyarakat

Masyarakat mempunyai kepentingan karena perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai bidang. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi *trend* dan perkembangan terakhir dari entitas dan aktivitas-aktivitasnya.

6. Laporan Tahunan

a. Pengertian dan Tujuan Laporan Tahunan

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 pasal 1 ayat (1) laporan tahunan memiliki artian sebagai laporan yang berisikan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



publik dalam kurun waktu satu tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tahunan (*annual report*) adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk para pemegang sahamnya. Laporan ini memuat laporan keuangan dasar dan juga analisis manajemen atas operasi tahun lalu dan pendapat mengenai prospek-prospek perusahaan di masa yang akan datang.

b. Komponen Laporan Tahunan

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 pasal 4 laporan tahunan wajib paling sedikit memuat:

- (1) Ikhtisar data keuangan penting.
- (2) Informasi saham (jika ada).
- (3) Laporan Direksi.
- (4) Laporan Dewan Komisaris.
- (5) Profil Emiten atau perusahaan publik.
- (6) Analisis dan pembahasan manajemen,
- (7) Tata kelola Emiten atau perusahaan publik.
- (8) Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau perusahaan publik.
- (9) Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit.
- (10) Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

7. Laporan Keberlanjutan

Elkington (1997) mendefinisikan *sustainability report* sebagai laporan yang memuat bukan sekedar informasi kinerja keuangan saja, namun memuat informasi non keuangan seperti informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). Menurut Susanto & Tarigan (2013) *sustainability report* banyak digunakan oleh institusi pemerintah seperti pihak kementerian lingkungan guna membuat penilaian atas kinerja perusahaan terhadap lingkungan atas setiap pelaporan organisasi. Berikut akan dipaparkan prinsip dan panduan pengungkapan menurut GRI Standard (2016):

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Prinsip Pengungkapan

(1) Inklusivitas pemangku kepentingan

Organisasi pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi pelapor itu telah menanggapi harapan dan kepentingan yang masuk akal dari para pemangku kepentingan.

(2) *Sustainability* (Keberlanjutan)

Laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas.

(3) Materialitas

Laporan harus mencakup topik-topik yang:

- (a) Mencerminkan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang signifikan dengan organisasi pelapor
- (b) Secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan dari para pemangku kepentingan

(4) *Completeness* (Kelengkapan)

Laporan harus menyertakan cakupan topik material dan batasan yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang signifikan, dan untuk memungkinkan para pemangku kepentingan menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan.

b. Panduan Pengungkapan

Bagian ini mencakup informasi latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratan. Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk dapat membuat klaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Pengungkapan GRI dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

(1) *General Disclosure* (GRI 102)

GRI 102 berisi mengenai pengungkapan umum yang berguna untuk melaporkan informasi kontekstual tentang dirinya dan praktik pelaporan keberlanjutannya. Beberapa hal umum yang akan diungkap pada GRI 102 adalah hal mengenai profil organisasi, strategi, etika dan integritas, tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan, dan praktik pelaporan.

(2) *Spesific Disclosure*

Pelaporan keberlanjutan yang berdasarkan pada Standar GRI memberikan informasi mengenai kontribusi positif ataupun negatif perusahaan bagi pembangunan keberlanjutan. Dalam Standar GRI pengungkapannya terbagi menjadi tiga bagian dengan kode 201-206 merupakan pengungkapan terhadap aspek ekonomi, kode 301-308 merupakan pengungkapan terhadap aspek lingkungan, dan yang terakhir kode 401-419 yang mengungkapkan mengenai aspek sosial. Berikut merupakan indikator *Corporate Social Responsibility* yang akan dibahas lebih mendalam lewat pedoman pelaporan keberlanjutan yang diatur dalam Standar GRI yaitu:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.1 GRI Standards

Indikator Kinerja: Ekonomi	
Seri 200: Ekonomi	
Aspek: Kinerja Ekonomi	
201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
Aspek: Keberadaan Pasar	
202-1	Rasio standar upah karyawan <i>entry-level</i> berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal
Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	
203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
Aspek: Perdagangan	
204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasukan lokal
Aspek: Anti Korupsi	
205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi
205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Aspek: Perilaku Anti Persaingan	
206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik <i>anti-trust</i> dan monopoli
Indikator Kinerja: Lingkungan	
Seri: 300	
Aspek: Material	
301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
301-2	Material <i>input</i> dari daur ulang yang digunakan
301-3	Produk <i>reclaimed</i> dan material kemasannya
Aspek: Energi	
302-1	Konsumsi energi dalam organisasi
302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
302-3	Intensitas energi
302-4	Pengurangan konsumsi energi
302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
Aspek: Air dan Efluen	
303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama
303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
303-3	Pengambilan air
303-4	Pembuangan air
303-5	Konsumsi air
Aspek: Keanekaragaman Hayati	

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

304-1	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi
304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
Aspek: Emisi	
305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
305-4	Intensitas emisi GRK
305-5	Pengurangan emisi GRK
305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)
305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara yang signifikan lainnya
Aspek: Air Limbah (Efluen) dan Limbah	
306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan
306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
306-3	Tumpahan yang signifikan
306-4	Pengangkutan limbah berbahaya
306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air
Aspek: Kepatuhan Lingkungan	
307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
Aspek: Penilaian Lingkungan Pemasok	
308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
Indikator Kinerja: Sosial	
Seri 3: 400	
Aspek: Kepegawaian	
401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu
401-3	Cuti melahirkan
Aspek: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen	
402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
Aspek: Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
403-2	Identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan investigasi insiden
403-3	Layanan kesehatan kerja
403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
403-9	Kecelakaan kerja
403-10	Penyakit akibat kerja
Aspek: Pelatihan dan Pendidikan	
404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
Aspek: Keanekaragaman dan Kesempatan Kerja	
405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
Aspek: Non-Diskriminasi	
406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
Aspek: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif	
407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
Aspek: Pekerja Anak	
408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
Aspek: Kerja Paksa atau Wajib Kerja	
409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap kerja paksa atau wajib kerja
Aspek: Praktik Keamanan	
410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
Aspek: Hak-Hak Masyarakat Adat	
411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
Aspek: Penilaian Hak Asasi Manusia	
412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak
412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
Aspek: Masyarakat Lokal	
413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan
413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
Aspek: Penilaian Sosial Pemasok	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
Aspek: Kebijakan Publik	
415-1	Kontribusi politik
Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	
416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
Aspek: Pemasaran dan Pelabelan	
417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa
417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
Aspek: Privasi Pelanggan	
418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Aspek: Kepatuhan Sosial Ekonomi	
419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang di bidang sosial dan ekonomi

8. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

a. *Pengertian Corporate Social Responsibility*

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau akrab disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki artian sebagai mekanisme di suatu lembaga yang dengan sukarela mengintegrasikan perhatiannya kepada lingkungan maupun sosial untuk diterapkan dalam operasi serta hubungannya dengan *stakeholders* yang bahkan melampaui tanggung jawab lembaga tersebut di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006).

Tanggung jawab sosial pada hakikatnya termasuk bentuk penerapan teori *stakeholder* serta legitimasi, karena merupakan upaya perusahaan dalam menjalankan tuntutan masyarakat dan tekanan dari para pemangku kepentingan guna mempertahankan posisi keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Wang et al. (2016) mengidentifikasi CSR memiliki peran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

sebagai pusat identitas perusahaan sebagai agen pembangun ekonomi serta institusi sosial dalam pasar ditempat perusahaan berjalan.

b. Konsep *Corporate Social Responsibility*

Pendapat Milton Friedman yang mengungkapkan bahwa tujuan utama suatu perusahaan adalah memperoleh *profit* semata, sudah mulai diabaikan. Sebaliknya, konsep *triple bottom line* (*profit, planet, people*) yang dikenalkan oleh John Elkington dalam bukunya yang berjudul “*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*” semakin dalam masuk ke *mainstream* etika bisnis (Suharto, 2008). Elkington (1997) mengatakan bahwa suatu perusahaan perlu menaruh perhatiannya kepada aspek sosial termasuk kesejahteraan masyarakat dalam perusahaan tersebut (*people*) dan partisipasinya terhadap lingkungan (*planet*) di samping orientasinya terhadap laba (*profit*).

Dengan CSR perusahaan dituntut untuk mampu meningkatkan perhatiannya terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja, interaksi antar perusahaan dengan masyarakat, investasi sosial perusahaan dan pandangan masyarakat terhadap *image* perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan serta akses modal. CSR bukan sekedar kegiatan amal perusahaan dan kegiatannya bukan hanya bertujuan untuk pemenuhan hukum maupun regulasi yang berlaku namun dapat membantu pengambilan keputusan dengan akurat. Berikut akan diuraikan secara jelas mengenai konsep *triple bottom line* dari setiap aspek:

(1) *Profit*

Secara umum, tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatan bisnis yang





dilakukan. Parinduri, Marlanfar, & Halim (2019) mengungkapkan bahwa *triple bottom line* melihat *profit* sebagai suatu rencana dari kegiatan bisnis. Schulz & Flanigan (2016) mengungkapkan bahwa perusahaan perlu menunjukkan perhatiannya terhadap tingkat produktivitas dan *return on asset* yang digunakan perusahaan sehingga mampu menyusun program demi menekan biaya yang akan dikeluarkan serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Schulz & Flanigan (2016) juga menambahkan bahwa dalam mempertahankan keberlangsungan perusahaannya, perusahaan butuh berfokus terhadap aktivitas finansial yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaannya.

(2) *People*

People atau masyarakat sendiri memiliki peran yang penting bagi sebuah perusahaan sebagai pemangku kepentingan, karena dengan dukungannya perusahaan dapat menjaga keberadaan, kelangsungan serta pengembangan perusahaan. Parinduri, Marlanfar, & Halim (2019) memandang aspek sosial (*people*) sebagai bentuk dari keterkaitan perusahaan dengan masyarakat serta seberapa besar manfaat perusahaan di mata masyarakat. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dipandang sebagai cara untuk “memberikan kembali” atau bentuk balas budi perusahaan kepada masyarakat atas sumber daya yang telah digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya.

Pada dasarnya tanggung jawab sosial merupakan hubungan timbal balik perusahaan dengan masyarakat, hal tersebut terjadi saat perusahaan memberikan pelayanannya kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat memenuhi kepentingan perusahaan itu sendiri. Schulz &

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Flanigan (2016) dalam penelitiannya saat menguraikan aspek sosial, mengatakan bahwa dampak sosial yang dihasilkan perusahaan dapat diukur lewat pelatihan karyawannya, akses sumber daya sosial, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, serta kinerja sosial bagi pelanggan dan pemasok.

(3) Planet

Planet atau dapat disebut lingkungan (*environment*) merupakan aspek yang berhubungan dengan seluruh bidang dalam kehidupan manusia. Namun, sebagian kelompok manusia masih kurang peduli akan lingkungannya sendiri karena mereka menganggap tidak ada keuntungan yang dapat mereka rasakan secara langsung. Aspek lingkungan, menuntut perusahaan untuk memberikan perhatiannya kepada lingkungan sekitar yaitu baik lingkungan hidup maupun lingkungan tak hidup.

Alhaddi (2015) mengatakan bahwa pelestarian lingkungan sangat dibutuhkan demi menjamin generasi mendatang agar dapat merasakan sumber daya alam dan lingkungan yang layak, terutama bagi para pelaku usaha yang kegiatan operasionalnya memiliki kemungkinan untuk merusak lingkungan itu sendiri. Upaya perusahaan dalam mengurangi penggunaan energi maupun sumber daya alam lainnya terbukti mampu memberikan dampak yang nyata terhadap keuangan suatu perusahaan, hal itu disebabkan karena upaya penghematan tersebut mampu mengefisiensikan biaya pengeluaran perusahaan yang mana jika ditelusuri lebih dalam dapat menjadi *value added* bagi perusahaan itu sendiri maupun di mata *stakeholder*, *shareholder* serta masyarakat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Menurut Crowther (2008) menjabarkan bahwa tanggung jawab sosial memiliki 3 prinsip utama, yaitu:

- (1) *Sustainability*, berkaitan dengan tindakan bisnis yang tetap memperhitungkan keberlanjutan (*sustainability*) sumber daya di masa depan.
- (2) *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas bisnis perusahaan yang berdampak pada lingkungan dan sosial kegiatan bisnis perusahaan.
- (3) *Transparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi adalah satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi kesalahpahaman khususnya informasi, mengurangi asimetri informasi dan pertanggungjawaban atas aktivitas bisnis perusahaan yang berdampak pada lingkungan dan sosial.

d. Pengelompokan Tanggung Jawab Sosial

Namun CSR sendiri merupakan kegiatan yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat dan nilai guna untuk segala pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Menurut Pearce & Robinson (2007) dalam Budiarta (2008) ada sepuluh pihak yang mempunyai kepentingan serta cara pandang yang berbeda terhadap perusahaan. Sepuluh pihak yang dimaksud merupakan *stockholders, creditors, employees, customers, suppliers, governments, unions, competitors, local community* dan *general public*. Makna dari kepentingan yang disebutkan diatas bisa berbentuk desakan secara ekonomi maupun non ekonomi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pearce and Robinson (2007) dalam Budiarta (2008) mengelompokkan CSR ke dalam empat kelompok yang akan diuraikan di bawah ini:

- (1) *Economic Responsibility* adalah tanggungjawab perusahaan secara ekonomi untuk menyediakan jasa dan barang kepada masyarakat dengan harga yang lazim serta dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
- (2) *Legal Responsibility* adalah segala peraturan dan undang-undang yang berlaku di lingkungan perusahaan beroperasi untuk mengelola kegiatan bisnis. Peraturan tersebut adalah peraturan yang bersangkutan dengan perlindungan konsumen dan pengaturan lingkungan.
- (3) *Ethical Responsibility* adalah etika perusahaan, di mana perusahaan yang didirikan tidak hanya patuh dan taat pada hukum yang berlaku namun juga harus memiliki etika.
- (4) *Discretionary Responsibility* adalah bentuk tanggung jawab yang sifatnya sukarela seperti menjalin hubungan dengan masyarakat, menjadi warga negara yang patuh, dll.

Kesadaran tentang pentingnya CSR menjadi perhatian dunia seiring dengan popularitas masyarakat dunia atas kepeduliannya kepada segala sesuatu yang ramah lingkungan serta diproduksi dengan mempertimbangkan norma-norma sosial serta prinsip-prinsip hak asasi manusia (Sulistyo, 2008 dalam Cahyono, 2011).

9. *Global Reporting Initiative Standard*

GRI adalah sebuah organisasi yang menyediakan kerangka kerja untuk pelaporan keberlanjutan yang dapat diadopsi oleh semua jenis organisasi di semua

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

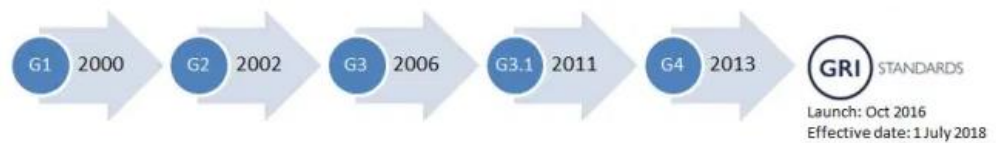
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

negara. GRI dibentuk oleh organisasi Amerika Serikat yang berbasis nirlaba yaitu *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) dan *Tellus Institute* dengan dukungan dari *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada tahun 1997 (GlobalReporting.org, 2020). Setelah sah dibentuk, GRI mengeluarkan panduan laporan keberlanjutan pertamanya pada tahun 2000. Secara berkala, GRI melakukan revisi terhadap panduan *sustainability report* dan umumnya menggunakan kode yang spesifik dalam penamaannya seperti pada gambar berikut ini:



Sumber : Habib (2017)

Gambar 2.1 Perkembangan GRI

Dari semua perubahan yang terjadi terhadap pedoman GRI, transformasi GRI G3.1 ke GRI G4 yang mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dalam hal penyusunan laporan keberlanjutan. Pada pedoman GRI G3.1 dan versi sebelumnya masih menggunakan konsep “*application level*”. Skema tersebut memecah laporan menjadi tiga level yaitu A, B, dan C sesuai dengan kriteria tertentu dan berdasarkan jumlah indikator yang diungkapkan. Pengungkapan indikator pada level C relatif yang paling minim dan level A relatif yang terbanyak sesuai konteks perusahaan masing-masing.

Pada pedoman GRI G4, “*application level*” dihilangkan sebab perusahaan berlomba-lomba “melaporkan indikator sebanyak mungkin” pada laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan supaya mencapai level A. Pada saat itu,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan dan para penyusun laporan keberlanjutan memiliki pandangan bahwa semakin banyak indikator yang dilaporkan artinya semakin baik. Kenyataannya, laporan keberlanjutan idealnya berfokus pada masalah-masalah yang relevan dan material terhadap konteks keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan, serta para pemangku kepentingannya.

Pada tahun 2015, GRI membentuk *Global Sustainability Standard Board* (GSSB) yang secara spesifik memiliki tugas untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Menyambut kuartal keempat tahun 2016, GRI GSSB mulai memperkenalkan *GRI Standards* yang kemudian diluncurkan di Indonesia pada tahun 2017 dan akan mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Juli 2018 (MajalahCSR.id, 2017)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

10. Konsep Pengungkapan

a. Pengertian Pengungkapan

Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien (Hendricksen & Breda, 1992 dalam Widiastuti, 2004). Sedangkan Evans (2003) dalam Suwardjono (2011:578) membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan dan mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

“Disclosure means supplying information in the financial statement, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosure associated with the statements...”

Dari definisi di atas terlihat bahwa pengungkapan merupakan bentuk penyajian informasi dalam bentuk laporan dan informasi tambahan lainnya. FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concepts No.1* (2008: 5) pengungkapan dipandang sebagai penyediaan informasi melebihi yang dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disampaikan dalam laporan keuangan formal, FASB juga menyatakan bahwa beberapa informasi penting lebih baik disediakan dalam bentuk laporan keuangan, namun beberapa yang lain lebih baik atau hanya dapat disediakan melalui pelaporan keuangan

b. Tingkat Pengungkapan

Secara umum konsep pengungkapan terbagi menjadi tiga menurut Hendriksen & Brenda (1992) dan Evans (2003) dalam Suwardjono (2011). Ketiga konsep pengungkapan ini menjelaskan atas berapa banyak informasi yang perlu diungkapkan, konsep tersebut meliputi:

(1) Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*)

Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang perlu dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan dalam kepentingan pengambilan keputusan.

(2) Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang perlu dicapai agar semua pihak mendapat informasi yang sama.

(3) Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*)

Pengungkapan ini menuntut penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan.

c. Sifat/Tipe Pengungkapan

(1) Pengungkapan Wajib

Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan minimum yang dilakukan perusahaan mengenai informasi yang harus diungkapkan. Menurut Naswandi (2009) dalam melakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengungkapan wajib suatu emiten perlu diatur dengan peraturan pasar modal suatu negara.

(2) Pengungkapan Sukarela

Menurut Naswandi (2009) pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan penyampaian informasi yang dilakukan perusahaan secara sukarela di luar pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi yang melebihi persyaratan minimum dari peraturan pasar modal yang berlaku. Pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan (Healy & Palepu, 1993). Dalam konteks pengungkapan sukarela, manajemen perusahaan bebas memilih untuk memberikan informasi akuntansi lainnya yang dianggap relevan dalam mendukung pengambilan keputusan oleh pemakai laporan tahunan (Meek, Roberts & Gray, 1995).

d. *Sustainability Report Disclosure*

Sustainability Report Disclosure atau pengungkapan laporan keberlanjutan menurut GRI (2018) terbagi menjadi tiga aspek, aspek tersebut meliputi:

(1) Ekonomi

Dimensi ekonomi keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada kondisi ekonomi *stakeholder* dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional dan global. Menurut Bukhori (2017) aspek ekonomi yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan lebih menjurus pada kontribusi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan terhadap seberapa besar sistem ekonomi. Menurut *GRI Standard* pengungkapan ekonomi terbagi menjadi beberapa aspek seperti kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, anti korupsi, dan perilaku anti persaingan.

(2) Lingkungan

Dimensi lingkungan keberlanjutan menyangkut dampak organisasi terhadap lingkungan hidup dan non-hidup sistem alam, termasuk ekosistem, tanah, udara, dan air (Bukhori & Sopian, 2017). Beberapa aspek yang dibahas dalam *GRI Standard* adalah aspek material, energi, air dan efluen, keanekaragaman hayati, emisi, air limbah (efluen) dan limbah, kepatuhan lingkungan, serta penilaian lingkungan pemasok.

(3) Sosial

Dimensi sosial keberlanjutan membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi (Bukhori & Sopian, 2017). Aspek yang dibahas dalam *GRI Standard* meliputi kepegawaian, hubungan tenaga kerja/manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan dan pendidikan, keanekaragaman dan kesempatan setara, non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, pekerja anak, kerja paksa atau wajib kerja, praktik keamanan, hak-hak masyarakat adat, penilaian hak asasi manusia, masyarakat lokal, penilaian sosial pemasok, kebijakan publik, kesehatan dan keselamatan pelanggan, pemasaran dan pelabelan, privasi pelanggan serta kepatuhan sosial ekonomi.

1. Tata Kelola Perusahaan

a. Definisi Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tata kelola perusahaan merupakan keterlibatan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya yang menyediakan struktur guna menetapkan tujuan perusahaan, dan cara untuk mencapai tujuan tersebut serta memantau kinerja tertentu (OECD, 2016). Sedangkan IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai berikut:

“*Good corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem dalam perusahaan yang dibentuk untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik dalam mendorong tercapainya tujuan perusahaan. Effendi (2009) menambahkan bawah *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat alat yang dapat mengatur dan mengendalikan perusahaan demi menghasilkan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal tersebut terjadi karena GCG dapat mendorong terciptanya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

b. Prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Menurut *The Organization for Economic Corporation and Development* (OECD), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penerapan *corporate governance* yaitu sebagai berikut:

(1) *Transparency* (keterbukaan)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keterbukaan kepada *stakeholder* dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan dengan lima karakteristik, yaitu komprehensif, relevan, *friendly*, *reliable*, dan *comparable*. Informasi mengenai laporan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan harus diungkap secara tepat dan akurat agar pemegang saham dan pihak lainnya dapat mengetahui keadaan perusahaan.

(2) *Accountability* (akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, struktur, sistem pengendalian, dan pertanggungjawaban organisasi perusahaan sehingga pengelolaan dan keseimbangan kekuasaan antara *stakeholders* terlaksana secara efektif. Para anggota eksekutif seperti komisaris, direksi, dan jajarannya wajib memiliki integritas untuk menjalankan usaha sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

(3) *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menuntut agar seluruh jajaran perusahaan untuk melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab dan mematuhi hukum yang ditetapkan.

(4) *Independency* (kemandirian)

Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perundangan yang berlaku. Setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Melindungi semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

c. Perhitungan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

(1) Kepemilikan Institusional

Menurut Griffin & Ebert (2007) dalam Revita (2018) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh investor besar seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* yang membeli saham perusahaan dalam jumlah besar. Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional dapat mengendalikan masalah keagenan karena keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal tersebut terjadi karena investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Aprianingsih (2016) mengungkapkan bahwa semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi tersebut untuk mengawasi pihak manajemen. Hal tersebut menghasilkan dorongan yang lebih besar dalam

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Meningkatnya kinerja perusahaan akan berdampak pada kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menyebabkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Shleifer & Vishny (1997) mengemukakan bahwa *institutional shareholders* dengan kepemilikan saham yang besar memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Permanasari (2010) mengungkapkan beberapa kelebihan kepemilikan institusional adalah:

- (a) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi
- (b) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan

Kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajer karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan yang lebih optimal agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang besar dalam pasar modal (Permanasari, 2010).

(2) Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006).

Menurut keputusan ketua BAPEPAM–LK No: Kep 643/BL/2012 pengertian dari komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan, bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir serta tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut. Komisaris independen juga dapat digunakan untuk mengatasi konflik keagenan karena komisaris independen dapat mengkomunikasikan tujuan para pemegang saham kepada para manajer (Julianti, 2015).

Dalam menjamin terciptanya tata kelola yang baik (*good corporate governance*) maka komisaris independen perlu memiliki kredibilitas, profesionalitas, serta integritas yang baik. Komisaris independen memikul tanggungjawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengawas sekaligus penasihat direksi dalam memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, memastikan perusahaan mematuhi hukum perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan di

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan, jika semua itu terpenuhi maka perusahaan dapat dikatakan memiliki *corporate governance* yang baik (Putra, 2015).

(3) Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Menurut Sutedi (2015) komite audit bertugas membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta peningkatan efektivitas laporan audit dan eksternal audit. Anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang yang diangkat dan diberhentikan oleh komisaris.

Komite audit merupakan komite tambahan yang memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan di dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk mencegah kecurangan pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan pandangan tentang masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi, keuangan, serta pengendalian internal perusahaan. Selain itu, juga berfungsi membantu dewan komisaris dalam memenuhi tanggungjawab memberikan pengawasan secara menyeluruh (Diantari & Ulupui, 2016). Anggota komite audit menurut Surya & Yustiavanda dalam Wulandari (2019) dapat berasal dari kalangan luar yang berpengalaman, ahli, serta memiliki kualitas lain yang dibutuhkan. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor serta hanya bertanggungjawab terhadap dewan komisaris.

(4) Dewan Direksi

Menurut KNKG (2006) dewan direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam



mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Menurut Rahmawati et al. (2017) fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi terdiri atas 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, salah satu prinsip yang perlu dipenuhi adalah komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen (KNKG, 2006). Pengangkatan dan pemecatan dewan direksi, penentuan besar penghasilannya, serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Byrd & Hickman (1992) peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Kinerja Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) kinerja dapat didefinisikan sebagai keterampilan perusahaan dalam melakukan kebijakan dan prosedur perusahaan yang mana merupakan efektifitas dan kuantifikasi dalam menjalankan suatu bisnis selama periode akuntansi tertentu dan kinerja perusahaan dapat diukur dengan mengevaluasi maupun menganalisa laporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan. Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai ketentuan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang kinerja keuangannya terus menerus menurun dapat beresiko mengalami *financial distress* yaitu keadaan di mana perusahaan mendekati kebangkrutan.

Kinerja keuangan perusahaan menjadi cerminan kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang dianalisis menggunakan alat-alat analisis keuangan untuk menilai baik atau buruknya kondisi keuangan serta prestasi kerja yang telah dicapai perusahaan dalam periode tertentu. Menurut Helfert dalam Widyastuti (2006) kinerja keuangan merupakan hasil dari keputusan manajemen secara individu yang dibuat secara terus menerus. Kinerja keuangan dijadikan patokan untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan di masa lalu. Pengukuran kinerja keuangan juga disertai dengan ukuran-ukuran non keuangan layaknya kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, kemampuan karyawan, proses internal yang responsif dan dapat diprediksi, dan sebagainya guna menentukan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Ukuran-ukuran non keuangan tersebut merupakan aktiva intelektual dan tak berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Nurmagfira, 2019).

Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas ROA sebagai proksi perhitungan kinerja keuangan. Menurut Ang (2007) rasio ini dapat mengukur kompetensi perusahaan atas seluruh dana yang ditanamkan ke dalam aktivitas yang digunakan untuk menjalankan serangkaian aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan memperoleh laba dari pemanfaatan aktiva yang dimilikinya. Plummer, Hutchison, & Patton (2007) menggunakan ROA dalam menjelaskan kegagalan keuangan pemerintah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio yang menggunakan nilai aktiva yang disusun dengan dasar akrual, salah

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



satunya adalah ROA yang mempunyai informasi lebih baik dibanding aktiva yang disajikan berdasarkan kas basis. Fraser & Ormiston (2014) juga menambahkan bahwa rasio ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh uang hasil investasi yang dilakukan dan strategi manajemennya.

Menurut IAI (2004) dalam Leki (2013) pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menyebutkan bahwa:

“Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.”

Informasi mengenai kinerja keuangan sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Pengembalian atas investasi modal bermanfaat untuk evaluasi manajemen, analisis profitabilitas, pendugaan laba, serta perencanaan dan pengendalian. Menggunakan angka pengembalian atas investasi modal untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan pemahaman yang matang mengenai ukuran pengembalian. Hal tersebut disebabkan oleh ukuran pengembalian mencakup komponen mengenai potensi pemberian kontribusi atas pemahaman kinerja perusahaan (Wild, Subramanyam & Halsey, 2005, dalam Ponttie, 2007).

3. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Menurut Suwito dan Herawaty (2005) dalam Helfi (2017) ukuran perusahaan adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang, dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan. Sedangkan menurut Utama (2000) ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total perusahaan juga dapat digunakan untuk

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengukur besar kecilnya perusahaan, karena biaya-biaya yang mengikuti penjualan cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba.

Menurut teori yang ada, ukuran perusahaan yang meningkat akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan ke arah yang positif. Pendapat tersebut didukung oleh teori *critical resources* oleh Kumar, Rajan & Zingales (2001), semakin besar skala suatu perusahaan maka semakin besar pula profitabilitas perusahaan itu karena perusahaan besar mampu mencapai skala ekonomis, sehingga dapat memperoleh keuntungan berupa pengurangan biaya produksi yang terjadi ketika perusahaan memproduksi dalam jumlah besar dengan menggunakan sumber daya yang sama.

Ada pula pendapat yang dikemukakan oleh Liargovas & Skandalis (2008), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu bahan pertimbangan investasi yang penting bagi investor dalam menanamkan sahamnya. Bagi investor, ukuran perusahaan dapat menjadi patokan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang bagus. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Prasetyantoko & Pramono (2008) yang berpendapat bahwa ukuran perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Hal tersebut dapat terjadi karena terciptanya hubungan yang searah antara ukuran perusahaan dan kinerja keuangan sebab perusahaan besar yang telah *listing* di Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar atas kegiatan operasinya, sehingga adanya peningkatan pada ukuran perusahaan dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Ukuran perusahaan menjadi faktor yang penting, sebab biaya transaksi yang berkaitan dengan penerbitan saham berhubungan dengan ukuran

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan (Hariyadi, 2014). Perusahaan besar tentu memiliki akses pasar yang lebih baik, sehingga sudah sewajarnya perusahaan tersebut membayar dividen yang tinggi terhadap pemegang sahamnya karena ukuran perusahaan dan pembayaran dividen memiliki hubungan yang positif.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan yang diproksikan dalam total aset, karna total aset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam logaritma naturan (Ghozali, 2006 dalam Helfi, 2017). Total aktiva merupakan sejumlah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya (Djarwanto, 2001 dalam Wufron, 2017), melalui total aktiva perusahaan dapat dikategorikan besar atau kecil berdasarkan kekayaan yang dimiliki. Pernyataan tersebut sejalan dengan Aprianingsih (2016) yang menjelaskan bahwa ukuran suatu perusahaan tercermin dari total aset yang dimiliki, semakin besar aset perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan, begitupun sebaliknya. Definisi tersebut menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dapat dinilai melalui total aset yang dimiliki. Aset memiliki arti yang sama dengan aktiva yaitu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijabarkan penelitian terdahulu yang melandasi pembentukan kerangka pemikiran dalam penelitian. Penelitian terdahulu akan terbagi atas penelitian terkait pengungkapan tanggung jawab sosial, tata kelola, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Informasi lebih lanjut mengenai penelitian terdahulu dapat dilihat pada bagian Lampiran 4 halaman 144.

Penelitian Aprianingsih (2016) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kinerja Keuangan” telah terpublikasi pada jurnal Universitas Negeri Yogyakarta. Industri yang diteliti mencakup perusahaan perbankan dengan jumlah sampel 42 perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 menunjukkan bahwa dewan direksi, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Saran penelitian selanjutnya berupa perubahan sektor, menambah variabel, dan menambah periode penelitian.

Penelitian Pamungkas & Winarsih (2020) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” telah terpublikasi pada jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU). Industri yang diteliti mencakup perusahaan barang konsumsi dengan jumlah sampel 10 perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dalam ROA, ROE, dan EPS. Saran penelitian selanjutnya berupa penambahan populasi menjadi seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI dan menggunakan variabel independen lainnya yang belum dibahas di penelitian ini.

Penelitian Simarmata (2018) yang berjudul “Analisa Pengaruh *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility* dan *Leverange* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa *Property* dan *Real Estate*” telah terpublikasi pada jurnal Universitas Sumatra Utara. Industri yang diteliti mencakup perusahaan *property* dan *real estate* dengan jumlah sampel 42 perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan manajerial dan CSR sosial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan institusional, komite audit, dan CSR kesehatan berpengaruh positif dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



signifikan terhadap kinerja keuangan. Saran penelitian selanjutnya berupa penambahan variabel.

Penelitian Tsummakuntum (2020) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan *Food And Beverages*” telah terpublikasi pada jurnal Ilmu dan Riset Manajemen. Industri yang diteliti mencakup makanan dan minuman dengan jumlah sampel 12 perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap ROA. Saran penelitian selanjutnya berupa peninjauan kembali terhadap variabel GCG, CSR dan kinerja keuangan.

Penelitian Mansaray et al. (2017) yang berjudul “*The Impact of Corporate Social Responsibility Disclosure on Financial Performance of Firms in Africa*” telah terpublikasi pada *International Journal of Economics and Financial Issues*. Industri yang diteliti mencakup seluruh perusahaan dengan jumlah sampel 158 perusahaan di enam negara Afrika periode 2005-2015 menunjukkan bahwa CSR berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA dan tidak berpengaruh terhadap ROE. Saran penelitian selanjutnya berupa peningkatan jumlah sampel akan membuat beberapa hasil yang tidak signifikan menjadi signifikan.

Penelitian Kyere & Ausloos (2021) yang berjudul “*Corporate Governance and Firms Financial Performance in the United Kingdom*” telah terpublikasi pada *International Journal of Finance and Economics*. Industri yang diteliti mencakup perusahaan seluruh perusahaan dengan jumlah sampel 252 perusahaan di *London Stock Exchange* periode 2014 menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap ROA, *board size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan Tobin’s Q, serta *independent board* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Saran penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



selanjutnya adalah untuk menggunakan teori lain seperti *stakeholder theory*, *shareholder theory*, *leadership cycle theory* dan lainnya untuk memperkenalkan variabel lain dalam pertimbangan, seperti ketekunan dewan atau masa jabatan CEO.

Penelitian Falah (2017) yang berjudul “*The Effect of Corporate Governance on Financial Performance of Listed Companies in Palestine Exchange (PEX)*” telah terpublikasi pada *International Research Journal of Finance and Economics*. Industri yang diteliti mencakup seluruh perusahaan dengan jumlah sampel 32 perusahaan di *exchange Palestine securities* periode 2008-2015 menunjukkan bahwa *board size* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA, ROE, dan Tobin’s Q, *independent director* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, ROE, dan Tobin’s Q. Saran penelitian selanjutnya berupa pengukuran karakteristik dewan dapat diperoleh dari apresiasi tingkat pendidikan, jenis kelamin dan kebangsaan anggotanya serta menggunakan 2 OLS model regresi

Penelitian Pekovic & Vogt (2020) yang berjudul “*The fit between corporate social responsibility and corporate governance: the impact on a firm’s financial performance*” telah terpublikasi pada jurnal *Review of Managerial Science*. Industri yang diteliti mencakup seluruh perusahaan di dunia dengan jumlah sampel 3371 perusahaan di ASSET4 dan *Worldscope* periode 2003-2013 menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap Tobin’s Q, *board size* mempengaruhi hubungan CSR dengan Tobin’s Q serta *board independence* mempengaruhi secara positif hubungan CSR dengan Tobin’s Q. Saran penelitian selanjutnya berupa penggunaan sampel dari negara yang berbeda, fokus pada negara yang memiliki ekonomi yang lemah, menggunakan perhitungan kinerja keuangan dengan ROA, ROS, atau ROE, serta melakukan analisis serupa dengan dimensi yang terpisah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian Ahamed et al. (2014) yang berjudul “*Does Corporate Social Responsibility Lead to Improve in Firm Financial Performance? Evidence from Malaysia*” telah terpublikasi pada *International Journal of Economics and Finance*. Industri yang diteliti mencakup 3 perusahaan besar yang terdaftar di papan utama Bursa Malaysia periode 2007-2011 menunjukkan bahwa CSR disclosure berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA maupun ROE dengan variabel kontrol yaitu *firm size* dan *firm revenue*. Saran penelitian selanjutnya berupa penambahan jumlah sampel dan waktu penelitian.

Penelitian Nyaruri et al. (2019) yang berjudul “*Relationship between Corporate Governance Quality and Financial Performance of Manufacturing Firms Listed at the Nairobi Securities Exchange*” telah terpublikasi pada *Journal of Finance and Accounting*. Industri yang diteliti mencakup perusahaan manufaktur dengan jumlah sampel 56 perusahaan di *Nairobi Securities Exchange* periode 2010-2017 menunjukkan bahwa *board meetings* dan *proportion independent* tidak berpengaruh terhadap ROA dan ROE, serta *board size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE dengan variabel kontrol *leverage* dan *growth*. Saran penelitian selanjutnya berupa pemilihan variabel lain untuk menilai faktor tata kelola lain yang berhubungan dengan kinerja keuangan selain dari ukuran tata kelola perusahaan.

Penelitian Tertius & Christiawan (2015) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan” telah terpublikasi pada jurnal *Business Accounting Review*. Industri yang diteliti mencakup perusahaan keuangan dengan jumlah sampel 62 perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013 menunjukkan bahwa dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA sedangkan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian Revita (2018) yang berjudul “Pengaruh GCG, CAR, LDR Terhadap Kinerja Keuangan Serta Harga Saham Perbankan” telah terpublikasi pada jurnal *Ecodemica*. Industri yang diteliti mencakup perusahaan perbankan dengan jumlah sampel 13 perusahaan yang mendapat penilaian terbaik dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) periode 2011-2013 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan LDR berpengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan komite audit, dan direksi, dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Saran penelitian selanjutnya berupa penerapan *self-assessment* yang merupakan 11 (sebelas) faktor penilaian terhadap pelaksanaan GCG.

Penelitian Utomo & Chandrarin (2018) yang berjudul “*Effect of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance on Financial Performance and Implications in Stock Companies Go Public in Indonesia Stock Exchange*” telah terpublikasi pada jurnal *Business and Management*. Industri yang diteliti mencakup perusahaan manufaktur dengan jumlah sampel 33 perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 menunjukkan bahwa CSR dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial performance*, serta GCG dan CSR dapat memediasi pengaruh *financial performance* terhadap *stock price*. Saran penelitian selanjutnya berupa penerapan penelitian untuk melawan perkembangan teori *signaling* mengenai variabel kinerja keuangan dan harga saham di pasar modal.

Penelitian Luthan et al. (2018) yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan” telah terpublikasi pada jurnal Universitas Andalas. Industri yang diteliti mencakup perusahaan manufaktur dengan jumlah sampel 45 perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 menunjukkan bahwa umur perusahaan mempengaruhi hubungan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA) dan CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan (ROA). Saran penelitian selanjutnya berupa perluasan sampel, perubahan variabel dan menggunakan data internal dari perusahaan.

Penelitian Melawati et al. (2016) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, CSR, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan” telah terpublikasi pada *Journal of Economic and Economic Education*. Industri yang diteliti mencakup perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia dengan jumlah sampel 21 perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 menunjukkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris, dan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Saran penelitian selanjutnya berupa penambahan jumlah sampel perusahaan dari semua sektor, menggunakan item pengukur yang lebih banyak dan mendetail serta menambah jumlah variabel.

Penelitian Maharani (2018) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017” telah terpublikasi pada jurnal Universitas Islam Indonesia. Industri yang diteliti mencakup perusahaan perusahaan *property* dan *real estate* dengan jumlah sampel 36 perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 menunjukkan bahwa dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan (ROA). Saran penelitian selanjutnya berupa penambahan sampel penelitian dengan jenis industri yang lain, menambah periode penelitian dan menambah variabel independen sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.

Penelitian Siregar & Bukit (2017) yang berjudul “*Impact of Corporate Social Responsibility and Company Size on Corporate Financial Performance with Good Corporate Governance as Moderating Variable*” telah terpublikasi pada jurnal *Advances in Economics, Business and Management Research* (AEBMR). Industri yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diteliti mencakup perusahaan pertanian dengan jumlah sampel 15 perusahaan yang terdaftar di BEI dan 40 perusahaan yang terdaftar di bursa Malaysia periode 2012-2014 menunjukkan bahwa CSR dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ROA serta kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan CSR dengan ROA. Saran penelitian selanjutnya berupa pengukuran kinerja perusahaan yang lainnya, menggunakan proksi tata kelola yang lainnya, menambah jumlah negara di ASEAN dan menggunakan sumber informasi CSR lainnya.

Penelitian Dewi & Pitawati (2018) yang berjudul “Pengaruh CSR, GCG, Inflasi Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan *High Profile* di Indonesia” telah terpublikasi pada Jurnal Riset Akuntansi (JUARA). Industri yang diteliti mencakup 10 perusahaan yang tergolong *High Profile* yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap EPS namun tidak berpengaruh terhadap ROA, ROE, dan NPM, sedangkan GCG berpengaruh terhadap ROA, ROE, dan NOM namun tidak terhadap EPS. Saran penelitian selanjutnya berupa pengambilan tahun penelitian yang lebih panjang dan sampel yang lebih luas serta menambah variabel lainnya.

Penelitian Utami (2017) yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan *High Profile* Terbuka di Indonesia” telah terpublikasi pada jurnal Universitas Sumatra Utara. Industri yang diteliti mencakup 74 perusahaan *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, ROE, dan NPM, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan NPM, namun berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. Saran penelitian selanjutnya berupa penambahan rasio keuangan atau variabel-variabel lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan perusahaan, serta menambah variabel bebas dalam pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian Sitorus (2020) yang berjudul “Pengaruh *Sustainability Report* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019” telah terpublikasi pada jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Industri yang diteliti mencakup 16 perusahaan *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa *sustainability report* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diwakili oleh ROA. Saran penelitian selanjutnya berupa penerapan periode penelitian yang berbeda serta menggunakan sampel dengan sektor yang berbeda.

Penelitian Putri (2020) yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Reporting* Terhadap Kinerja Keuangan” telah terpublikasi pada jurnal Universitas Muhammadiyah. Industri yang diteliti mencakup 15 perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa *sustainability report* aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial tidak berpengaruh terhadap ROA dengan ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Saran penelitian selanjutnya berupa penggunaan sampel perusahaan lain dan periode tahun penelitian yang lebih lama.

C. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara terperinci penelitian terdahulu yang menjadi dasar pembentukan kerangka pemikiran dalam penelitian. Penelitian terdahulu terbagi menjadi penelitian yang membahas mengenai hal-hal di bawah ini:

1. Pengaruh CSRD Terhadap *Return on Asset*

Hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan profitabilitas telah menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak, sehingga timbul pokok pikiran



yang menghasilkan prediksi yang berbeda-beda. Herremans et al. (1993) menyebutkan beberapa pokok pikiran mengenai hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan profitabilitas, antara lain: (a) Pokok pikiran yang menggambarkan kebijakan konvensional, berpendapat bahwa terdapat biaya tambahan yang signifikan dan akan menghilangkan peluang perolehan laba untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, sehingga akan menurunkan profitabilitas, (b) Biaya tambahan khusus untuk melaksanakan tanggung jawab sosial akan menghasilkan dampak netral terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan tambahan biaya yang dikeluarkan akan tertutupi oleh keuntungan efisiensi yang ditimbulkan oleh pengeluaran biaya tersebut, (c) Pokok pikiran yang memprediksi bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berdampak positif terhadap profitabilitas.

Umumnya, pengaruh pelaksanaan *corporate social responsibility* memang tidak berdampak secara langsung kepada kinerja keuangan dalam jangka pendek. Namun, menurut Peters & Mullen (2009) perusahaan yang melaksanakan CSR secara terus menerus dapat memberikan dampak secara langsung atau pun tidak langsung kepada kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Paul & Siegel (2006) menyatakan bahwa program CSR memiliki dampak produktif yang signifikan terhadap efisiensi, perubahan teknikal, dan skala ekonomi perusahaan. Narver (1971) juga menambahkan bahwa dengan hanya memperhatikan kondisi keuangan suatu perusahaan ternyata tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya kepada para *stakeholder* (pemangku kepentingan).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



CSR dipandang sebagai bentuk aktivitas legitimasi terhadap masyarakat

① karena merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai media untuk mengkonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Nor Hadi, 2010 dalam Sari, 2012). Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. O'donovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk mempertahankan hidup (*going concern*).

Penelitian Heal & Garret (2004) menunjukkan bahwa aktivitas CSR dapat menjadi elemen yang menguntungkan dalam strategi perusahaan, memberikan kontribusi kepada manajemen risiko dan memelihara hubungan yang dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan pengungkapan CSR akan lebih diuntungkan karena dapat membangun citra baik perusahaan sehingga mampu melegitimasi masyarakat lewat program-program yang dijalankan dan pada akhirnya perusahaan memperoleh kesetiaan pelanggan dan kepercayaan dari kreditor maupun investor. Kesetiaan dan kepercayaan tersebut memicu keuangan perusahaan menjadi lebih baik serta laba perusahaan akan meningkat diikuti dengan kenaikan ROA perusahaan di tahun berikutnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Luthan et al. (2018), pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap ROA perusahaan. Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

① Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut dapat terjadi karena lewat pengungkapan CSR perusahaan dapat mengirimkan *signal* promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain karena peduli dengan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari aktivitas perusahaan, hal ini sejalan dengan *signaling theory* di mana perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya dengan mengirimkan *signal* melalui laporan tahunannya (Amel & Setiyani, 2018 dalam Lestari, 2020). Pendapat tersebut didukung oleh Hendrawan (2019), Pamungkas & Winarsih (2020), serta Jekwam & Hermuningsih (2018) yang menunjukkan hasil yang sejalan.

Namun menurut Ullmann (1985) tanggung jawab sosial yang tinggi akan menghasilkan biaya tambahan bagi perusahaan sehingga menurunkan tingkat profitabilitas. Pengaruh negatif tersebut dikarenakan adanya pandangan dari perusahaan bahwa dengan mengeluarkan biaya sosial akan menambah beban perusahaan karena perusahaan juga harus bertanggungjawab kepada para pemegang saham atas berkurangnya laba yang akan dibagikan karena digunakan untuk biaya sosial. Dengan demikian perusahaan harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan keuntungan efisiensi yang ditimbulkan oleh pengeluaran biaya tersebut (Januarti & Apriyanti, 2005).

Tingginya pengungkapan informasi sosial pada *sustainability report* menandakan banyaknya program yang telah diwujudkan oleh perusahaan dalam tahun tersebut sehingga mengindikasikan biaya pengungkapan yang tinggi. Aktivitas CSR yang menambah biaya (*cost*) tersebut akan menjadi beban (*expenses*) operasi perusahaan sehingga pada akhirnya mengurangi tingkat profitabilitas perusahaan. Nollet et al. (2015) dalam Sari et al. (2016) menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk aktivitas CSR justru akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengurangi profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan ROA. Hal tersebut juga dapat disebabkan karena sinyal yang dikirim oleh perusahaan lewat *sustainability report* tidak diterima dengan baik oleh masyarakat karena rendahnya kesadaran mengenai isu CSR akan menyebabkan masyarakat kurang tertarik membeli produk dan jasa perusahaan sehingga akan mengurangi profit yang diperoleh (Sari et al., 2016).

Beberapa peneliti yang berhasil menunjukkan adanya pengaruh negatif antara pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap kinerja keuangan yaitu Nilhasanah (2018), Putri (2020), dan Sari et al. (2016). Menurut Nilhasanah (2018) *legitimate* dari masyarakat terhadap perusahaan tidak dapat dibangun dan diamati dalam waktu yang singkat. Biaya CSR yang perusahaan keluarkan di tahun tertentu tidak dapat langsung memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan di tahun yang sama atau di tahun berikutnya. Hal ini karena proses membangun legitimasi, kepercayaan, loyalitas dan reputasi tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.

Maka berdasarkan tinjauan pustaka dan paparan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu yang menemukan bahwa CSR dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara positif maupun negatif, penulis membuat hipotesis bahwa *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Return on Asset*

Badan atau institusi yang berasal dari luar perusahaan, selaku pemilik perusahaan dapat menjadi *controller* atau pihak pengawas manajemen perusahaan agar bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya (Reza, 2019). Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terlaksananya fungsi *controlling* oleh pihak institusional, akan membuat pihak institusional dan manajemen perusahaan bekerja sama demi mengurangi tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh manajemen perusahaan itu sendiri yang akan berimplikasi terhadap kinerja keuangan. Kerja sama tersebut juga merupakan realisasi teori agensi, di mana pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh manajer akan lebih ketat ketika kepemilikan saham terkonsentrasi. Dengan adanya kepemilikan saham terkonsentrasi maka keragaman kepentingan pemegang saham berkurang, sehingga ada kemungkinan tercipta kerja sama antara pihak manajer dan pemegang saham untuk meningkatkan nilai perusahaan (Puspitasari & Ernawati, 2010 dalam Fadillah, 2017).

Cornett et al. (2007) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer. Menurut Aprianingsih (2016) investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis di perusahaan. Sehingga dengan adanya pengawasan dari institusi, manajer akan lebih hati-hati dalam melakukan pengelolaan dan memiliki kemungkinan sangat kecil untuk melakukan manipulasi keuangan. Kepemilikan institusional diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas perusahaan.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer. Beberapa peneliti menunjukkan hasil yang positif dan signifikan antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dalam ROA seperti Hartati (2020), Reza (2019), Simarmata (2018) serta Saifi (2019). Berlawanan dengan hasil penelitian tersebut, beberapa penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berikut ini menemukan adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aprianingsih (2016), Indarti & Extaliyus (2013) dan Kusumandari (2016). Kepemilikan institusi yang cenderung tinggi membuat perusahaan yang dibeli sahamnya harus memberikan bunga yang cukup tinggi juga kepada pemegang saham dari perusahaan lain. Dengan begitu profitabilitas perusahaan akan menurun karena harus memberikan bunga kepada pemegang saham perusahaan lain.

Selain itu, ada kemungkinan bahwa institusi cenderung akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas dan akan membuat terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan arah kebijakan perusahaan yang nantinya justru lebih menguntungkan pemegang saham mayoritas yaitu institusi dengan adanya proporsi kepemilikan yang cukup tinggi ini. Dengan keadaan seperti itu tidak akan meningkatkan profitabilitas perusahaan atau bahkan cenderung membuat penurunan tingkat profitabilitas (Kusumandari, 2016). Kondisi tersebut sesuai dengan salah satu asumsi terkait teori keagenan yang dikemukakan oleh Eisenhardt (1989) yaitu sudut pandang manusia (*people*) yang memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia juga mempunyai daya pikir yang terbatas menyangkut persepsi masa depan (*bounded rationality*), dan manusia selalu enggan mengambil risiko (*risk averse*) yang menjadi penyebab munculnya masalah keagenan.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang dibangun bahwa terdapat pengaruh secara positif maupun negatif antara hubungan kepemilikan saham institusi dengan kinerja keuangan, penulis memutuskan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membuat hipotesis bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Return on Asset*

Kabir & Thai (2017) mengatakan ukuran dewan komisaris yang besar dapat berarti keputusan yang dihasilkan merupakan mufakat dari pertentangan kepentingan diantara dewan komisaris itu sendiri, sehingga keputusan dewan komisaris yang berukuran lebih besar dapat lebih mewakili kepentingan *stakeholder* perusahaan dari pada dewan komisaris yang berukuran kecil. Kondisi tersebut mengindikasi bahwa perusahaan telah beroperasi secara efektif dan efisien sesuai kepentingan *stakeholder* serta memastikan diterapkannya *good corporate governance*. Dikatakan efisien karena dewan komisaris yang memiliki fungsi dan peran penting dalam mengawasi dan mengatur kinerja manajemen (agen) agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (prinsipal) telah terwujud (Lastian, 2013). Kesesuaian kepentingan yang terjadi di antara prinsipal dan agen dapat mengurangi biaya keagenan dalam perusahaan sehingga profitabilitas yang diperoleh akan semakin tinggi.

Pendapat tersebut didukung oleh Aprianingsih (2016) dengan mengatakan komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris guna melakukan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi secara efektif sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan terciptanya tata kelola yang baik, maka akan terbentuk pengelolaan usaha yang baik dan akan terjadi peningkatan kinerja perusahaan yang ditunjukkan dalam kinerja keuangan perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dewan komisaris independen tidak mempunyai otoritas langsung terhadap perusahaan. Namun posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan karena fungsi utama dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi atas kinerja dewan direksi (Kusumandari, 2016). Sehingga diharapkan tingginya dewan komisaris independen dapat mengurangi tingkat kelalaian yang disebabkan oleh manajer yang mana bisa berdampak terhadap kepercayaan investor atas kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dalam ROA telah diteliti oleh banyak peneliti dan menunjukkan hasil yang positif seperti pada penelitian Rahmawati et al. (2017), Simanjuntak & Sudjiman (2020), Kyere & Ausloos (2021), Saifi (2019), dan Tsummakuntum (2020). Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2017), Oemar (2014) dan Rimardhani & Hidayat (2016) menunjukkan hasil yang berlawanan, yaitu dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Rimardhani & Hidayat (2016) menyatakan pengaruh negatif tersebut dapat disebabkan karena semakin besar proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan keahlian dan pengalaman yang beragam, akan memungkinkan menyebabkan penurunan kemampuan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan karena muncul masalah koordinasi, komunikasi dan pembuatan keputusan. Selain itu, peran dari dewan komisaris independen yang seharusnya bersikap independen dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau manajemen dan bertindak hanya untuk kepentingan perusahaan belum terlaksana dengan baik. Menurutnya hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sekedar memenuhi kepatuhan tanpa mengoptimalkan peran dewan komisaris independen sebagai pengawas kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Keadaan tata kelola tersebut dapat memperburuk konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga akan memunculkan biaya keagenan untuk mengatasi konflik tersebut yang mana akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dibangun oleh peneliti terdahulu yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan negatif antara dewan komisaris independen dengan kinerja keuangan, penulis memutuskan untuk membuat hipotesis bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

4 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Return on Asset*

Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan (Simarmata, 2018). Karena tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris maka dengan semakin banyaknya anggota komite audit, maka pengawasan yang dilakukan semakin baik dan diharapkan dapat meminimalisir upaya manajemen untuk memanipulasi masalah data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat.

Semakin banyak jumlah anggota komite audit maka semakin baik fungsi pengawasan yang dilakukan sehingga dapat mengontrol seluruh aspek kinerja perusahaan dan akan semakin mudah mengendalikan serta memantau manajemen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



puncak akan semakin efektif (Erawati & Sari, 2021). Jika laporan hasil audit tersebut baik, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga membawa manajemen tersebut untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya terhadap para *stakeholder*. Pemikiran tersebut didukung oleh beberapa peneliti yang telah membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang di proksikan oleh ROA, beberapa peneliti tersebut adalah Simanjuntak & Sudjiman (2020), Simarmata (2018), Tsummakuntum (2020) dan Aprianingsih (2016).

Namun, ada pemikiran lain yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara komite audit dengan kinerja keuangan. Menurut penelitian Krisnauli & Hadiprajitno (2014) variabel komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat biaya keagenan suatu perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan semakin tinggi ukuran komite audit maka akan semakin kecil rasio perputaran aset yang dihasilkan perusahaan. Rendahnya perputaran aset (ATO) menandakan bahwa penjualan perusahaan rendah dan mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan mengimplikasikan kebijakan yang tidak efektif dan efisien sehingga muncul masalah keagenan yang membuat biaya keagenan tinggi. Hal tersebut memicu kinerja keuangan yang rendah karena perusahaan perlu mengeluarkan sejumlah biaya untuk menyelesaikan masalah keagenan tersebut.

Beberapa peneliti yang membuktikan adanya pengaruh negatif komite audit terhadap kinerja keuangan adalah Kyere & Ausloos (2021) dan Romano et al. (2012). Menurut Romano et al. (2012) dengan anggota komite audit yang lebih sedikit, maka akan meningkatkan pengendalian internal serta kewaspadaan atas kegiatan dan keputusan yang diambil oleh dewan yang akhirnya akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkatkan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang dibangun, penulis membuat hipotesis bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

5 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Return on Asset*

Deskripsi bahwa manajer adalah agen bagi para pemegang saham atau dewan direksi adalah benar sesuai dengan teori keagenan. Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan dan melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor (Sukandar & Rahardja, 2014). Semakin meningkatnya jumlah dewan direksi, maka akan semakin banyak yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laksana (2015) menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dewan direksi dalam perusahaan maka koordinasi dan komunikasi akan cenderung lebih mudah dilakukan, sehingga kinerja keuangan perusahaan akan semakin meningkat. Dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Maka dari itu semakin banyak anggota dewan direksi, akan semakin jelas pembagian tugas dari masing-masing anggota, yang tentunya akan berdampak positif bagi para *stakeholder*. Selain itu, semakin banyak anggota dewan direksi maka *network* yang dibangun dengan pihak luar perusahaan akan menjadi lebih luas sehingga kinerja keuangan perusahaan akan semakin membaik (Rahmawati et al., 2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian mengenai pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dalam ROA telah diuji oleh banyak peneliti dan menunjukkan hasil yang positif serta signifikan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Aprianingsih (2016), Rahmawati et al. (2017), dan Kusumandari (2016). Namun, pendapat lain muncul dari Pryanthi & Laurens (2020) yang mengatakan jika jumlah dewan direksi bertambah maka akan menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

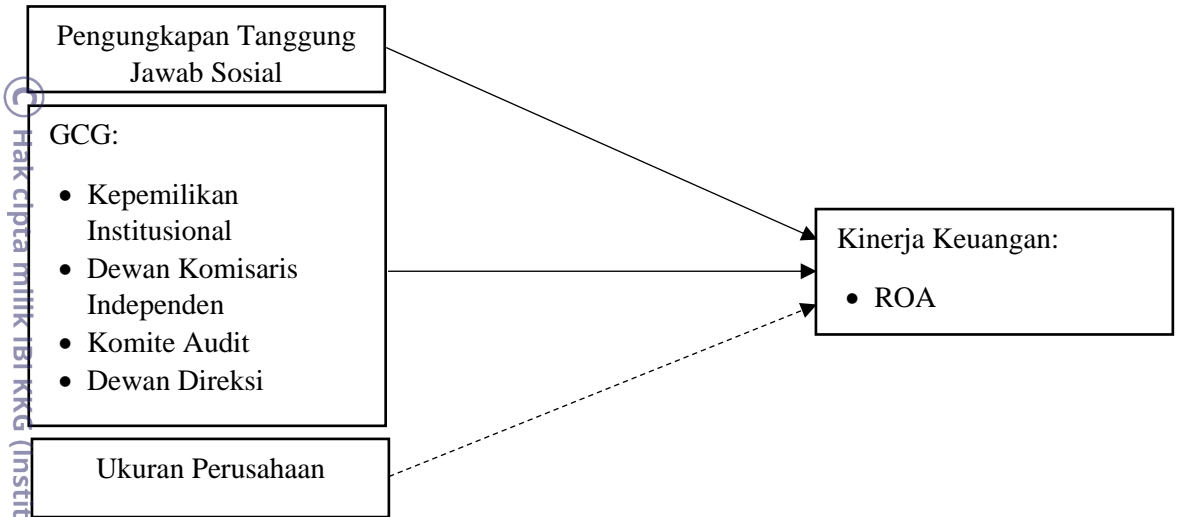
Fama & Jensen (1983) dalam Topal (2014) berpendapat bahwa peningkatan jumlah anggota dewan memperlambat proses pengambilan keputusan perusahaan dan menyebabkan dewan mengabaikan masalah, sehingga terjadi penurunan nilai dan efektivitas perusahaan. Lipton & Lorsch (1992) dan Jensen (1993) dalam Topal (2014) menjelaskan dalam penelitian yang mereka lakukan bahwa terdapat kemungkinan adanya masalah komunikasi dan koordinasi di perusahaan dengan dewan yang lebih besar. Rouf (2011) dalam Gill & Obradovich (2012) menambahkan bahwa ukuran dewan direksi yang lebih kecil umumnya dipercaya mampu meningkatkan kinerja perusahaan karena manfaat yang diperoleh sebanding dengan ukuran dewan direksi yang lebih besar namun dengan tingkat komunikasi yang lebih baik. Penelitian yang memiliki hasil serupa dengan pendapat tersebut adalah Gill & Obradovich (2012), Pryanthi & Laurens (2020), dan Topal (2014). Sehingga berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang dibangun, penulis membuat hipotesis bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dalam ROA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan sebelumnya maka penulis menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H_{a1} : Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial berpengaruh terhadap *Return on Asset*.
2. H_{a2} : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Return on Asset*.
3. H_{a3} : Komisaris independen berpengaruh terhadap *Return on Asset*.
4. H_{a4} : Komite Audit berpengaruh terhadap *Return on Asset*.
5. H_{a5} : Dewan Direksi berpengaruh terhadap *Return on Asset*.